

EKONOMI SUBSIDI

Field Notes: Cara Mafia Solar Beroperasi

Kronologi dari SPBU Pantura sampai PertaminaGate: bagaimana selisih harga Solar Rp 5.150/liter menciptakan industri penyelewengan senilai ratusan triliun.

FORMAT

Field Notes

ESTIMASI BACA

6 menit

UNTUK

Jurnalis, peneliti, warga yang ingin tahu ke mana Solar bersubsidi pergi

Solar bersubsidi dijual Rp 6.800/liter. Harga keekonomiannya Rp 11.950. Selisih Rp 5.150 per liter. Di seluruh Indonesia, lebih dari 4 juta kendaraan dan ribuan kapal mengonsumsi Solar bersubsidi setiap hari. Selisih itu menciptakan arbitrase yang, kalau tidak dijaga ketat, mengalir ke kantong yang salah. Ini catatan lapangan tentang bagaimana penyelewengan Solar beroperasi, dari yang kecil sampai yang kolosal.

Level 1: Operasi kecil di pinggir jalan

Modus paling sederhana: tangki kendaraan dimodifikasi untuk muat lebih banyak dari kapasitas resmi. Satu truk dengan tangki 300 liter bisa dimodifikasi menyimpan 500-600 liter. Kelebihan diambil di SPBU yang sama, lalu dijual ke industri atau gudang ilegal dengan harga mendekati harga pasar.

01 Modifikasi tangki

Tangki kendaraan diperbesar atau dipasang tangki tersembunyi. Tidak terlihat dari luar. Di antrian SPBU terlihat seperti kendaraan biasa.

02 Pengisian di bawah harga pasar

Isi Solar bersubsidi Rp 6.800/liter. Kapasitas resmi 200 liter, tapi tangki tersembunyi muat 100 liter ekstra. Uang yang 'dihemat': $100 \text{ liter} \times \text{Rp } 5.150 = \text{Rp } 515.000$ per pengisian.

03 Penjualan ke industri

Kelebihan Solar dijual ke pabrik, tambang, atau perkebunan dengan harga Rp 9.000-10.000/liter. Margin Rp 2.200-3.200/liter untuk operasi yang risiko hukumnya relatif kecil.

HUKUMAN YANG TIDAK MENCEGAH

Hukuman maksimum penyelewengan BBM bersubsidi: 6 tahun penjara + denda Rp 60 miliar. Tapi rasio pengawas BPH Migas vs ribuan SPBU + puluhan ribu pangkalan = secara matematis mustahil mengawasi semuanya. DPR sendiri menyebut pengawasan BPH Migas 'melempem.'

Level 2: Operasi terorganisir

Kasus-kasus yang berhasil diungkap Bareskrim dan Polda:

LOKASI	TAHUN	NILAI	MODUS
Kolaka, Sulawesi Tenggara	2024	Rp 105 miliar	Penyelewengan Solar industri nelayan ke perkebunan sawit
Surabaya	2025	Tidak dilaporkan	Tangki modifikasi, 4 tersangka diamankan
Banjarmasin	2025	Tidak dilaporkan	Gudang ilegal, pencampuran Solar subsidi dan non-subsidi
Bali	2025	Rp 4,8 miliar	Penimbunan dan penjualan ke industri pariwisata

Yang tertangkap hanya yang paling tidak hati-hati. Berapa volume total yang tidak tertangkap tidak ada yang tahu. Yang bisa dipastikan: selama selisih harga Rp 5.150/liter tetap ada, insentif penyelewengan tidak akan hilang.

LOGIKA EKONOMI

Buat model sederhana: operasi kecil mengalihkan 100 kiloliter Solar per hari. Margin Rp 3.000/liter. Penghasilan: Rp 300 juta per hari, atau Rp 109 miliar per tahun. Risiko tertangkap: rendah. Kalau tertangkap, jaminan Rp 60 miliar. Ini bukan irrasional. Ini rasional secara kriminal.

Level 3: PertaminaGate

Pada 2025, Kejaksaan mengungkap apa yang disebut skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.

Rp 968,5 T

ESTIMASI TOTAL KERUGIAN
NEGARA 2018-2023

18

TERSANGKA (14 EKSEKUTIF
PERTAMINA, 4 PIHAK SWASTA)

5 tahun

PERIODE YANG DISIDIK TANPA
TERDETEKSI

Rp 285 T

ANGKA KERUGIAN YANG LEBIH
TERVERIFIKASI (MINYAK MENTAH
+ KILANG)

Skema yang dituduhkan: impor minyak mentah ilegal, pencampuran Pertamax (RON 92) dengan bensin berkualitas lebih rendah, dan manipulasi tender pengadaan dengan harga yang digelembungkan. Periode: 2018-2023.

Nama yang disebut: Riza Chalid, dijuluki media sebagai 'raja minyak.' Koneksi politiknya menjangkau jauh.

DAMPAK PUBLIK LANGSUNG

Boikot massal Pertamina. Konsumen beralih ke Shell, BP, Vivo. Antrian di SPBU asing memanjang. Pertamina menguasai lebih dari 90% distribusi BBM Indonesia, jadi boikot lebih simbolis dari ekonomis. Tapi sentimen di baliknya nyata: rasa dikhianati dari BUMN yang seharusnya mengelola uang publik.

Kesimpulan field notes

Dari tangki modifikasi di Pantura sampai Rp 968,5 triliun di Kejaksaan Agung: selisih harga subsidi menciptakan gradasi penyelewengan dari yang kecil sampai yang kolosal. Pengawasan tidak sebanding dengan skala sistem. Selama subsidi melekat pada produk, bukan pada orang, titik bocor akan selalu ada.

DOKUMEN INI BAGIAN DARI SEBUAH BUKU

Ekonomi Subsidi

Mengapa Indonesia Membayar untuk Tetap Miskin

Dokumen yang baru saja kamu baca adalah ringkasan dari satu sudut pandang di buku ini. Isi lengkapnya mencakup 11 bab, audit angka per angka, dan studi banding negara lain. Baca versi lengkap di Google Play Books.

Baca buku lengkap di Google Play Books

Ekonomi Subsidi tersedia di Google Play. Format e-book, bisa dibaca di ponsel, tablet, atau browser. Pembelian satu kali, akses selamanya di akun Google kamu.

[Buka di Google Play Books >](#)

<https://play.google.com/store/books/details?id=0gDLEQAAQBAJ>

DOKUMEN PENDAMPING LAINNYA

01 Audit subsidi di dapur · hitung subsidi yang masuk dan keluar rumah tangga kamu

04 Cheatsheet subsidi vs tax expenditure · bedanya subsidi "terlihat" dengan insentif pajak

08 Indonesia vs India · apa yang bisa ditiru dari Aadhaar + PAHAL

TENTANG PENULIS

Hibranwar adalah praktisi dan penulis. Dokumen ini No. 07 dari 10 pendamping buku "Ekonomi Subsidi". Boleh dibagikan, dicetak, dan dikutip dengan atribusi.

KONTAK & KANAL

Web: hibranwar.com

Buku: [Google Play Books](#)

© 2026 Hibranwar. CC BY 4.0 · Versi 2026.04.24